

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi yang semakin dinamis dan penuh tantangan, yang ditandai oleh percepatan arus informasi serta kemajuan teknologi digital, pengelolaan keuangan daerah memegang peranan yang semakin krusial dalam menciptakan transparansi serta memperkuat akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik dalam konteks pengelolaan keuangan daerah berarti bahwa pemerintah tidak hanya bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya keuangan, tetapi juga wajib memberikan laporan yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan tanggung jawab dari daerah otonom untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan serta melayani kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, organisasi sektor publik membutuhkan penguatan akuntabilitas sebagai wujud kewajiban untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja mereka, baik dalam hal keberhasilan maupun kegagalan, terkait dengan pencapaian tujuan organisasi serta pelaksanaan misi yang telah ditetapkan (Standbury & Mardiasmo dalam Nuraini, 2020).

Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat harus disusun secara transparan dan mencerminkan data yang valid agar dapat dipahami oleh pengguna laporan tersebut. Oleh karena itu, penyajian laporan

yang akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya menjadi hal yang krusial untuk memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan. Dengan memenuhi standar tersebut, laporan keuangan berfungsi tidak hanya sebagai sarana informasi, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat akuntabilitas dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (Erawati dan Abdulhadi dalam Sri Ayem, 2023).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan yang andal adalah laporan yang mencerminkan kejujuran, dapat diverifikasi, dan bersifat netral. Kejujuran dalam representasi berarti bahwa data yang disajikan secara akurat mencerminkan transaksi dan kejadian yang relevan secara wajar. Kemampuan diverifikasi menunjukkan bahwa informasi dalam laporan tersebut dapat diuji ulang, dan hasil pemeriksaan oleh pihak lain akan menghasilkan kesimpulan yang tidak berbeda secara signifikan. Sementara itu, netralitas mengacu pada penyajian data yang ditujukan untuk kepentingan umum, tanpa mengutamakan kebutuhan pihak tertentu (Peraturan Pemerintah, 2010).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, laporan keuangan berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara atau daerah dalam periode tertentu. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan penerapan standar yang memadai, yaitu mencakup aspek relevansi, keandalan (reliabilitas), kemampuan untuk dievaluasi atau dibandingkan (komparabilitas), serta aksesibilitas yang baik bagi para pengguna laporan (Tawaqal dan Suparno dalam Sri Ayem, 2023).

Penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi terkait posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, serta perubahan ekuitas dari suatu entitas pelaporan. Informasi ini berguna bagi para pengguna dalam membuat, mengevaluasi, dan menentukan keputusan terkait alokasi sumber daya. Laporan keuangan pemerintah memegang peran penting sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan. Bentuk hasil kerja dapat dilihat secara kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan (Rizal & Fernanda, 2018). Untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan berkualitas, suatu organisasi perlu memiliki Sistem Informasi yang andal. Sistem ini berfungsi untuk menghasilkan data keuangan yang akurat dan terstruktur, yang dikenal sebagai Sistem Informasi Akuntansi. Penerapan sistem tersebut relevan baik bagi organisasi bisnis maupun bagi organisasi sektor publik, termasuk pemerintah daerah (Tawaqal dan Suparno dalam Annisa, 2023).

Kualitas laporan keuangan Kota Medan dapat dilihat dari opini yang diberikan oleh BPK RI. Setiap tahun, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dinilai dan diberikan opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), berarti laporan keuangan tersebut telah disusun dan diungkapkan dengan wajar serta berkualitas. BPK memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP).

BPK melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Medan dengan hasil sebanyak 28 dari 34 pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara (82,35%) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Secara rinci, opini WTP diraih oleh 1 pemerintah provinsi (100%), 21 pemerintah kabupaten (84%), dan 6 pemerintah kota (75%). Pemerintah provinsi dan kabupaten berhasil melampaui target opini WTP yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, masing-masing sebesar 93% dan 82% pada tahun 2022. Namun, capaian opini pemerintah kota masih di bawah target RPJMN sebesar 93% untuk tahun yang sama (IHPD BPK, 2023).

Selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga memeriksa sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. SPI merupakan proses yang dirancang untuk memastikan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, ketaatan pada regulasi, serta pengamanan aset. Pemeriksaan SPI bertujuan mengkaji efektivitas pengendalian internal dan mendeteksi potensi kesalahan (error) atau kecurangan (fraud).

Sementara itu, pemeriksaan kepatuhan menilai apakah entitas yang diaudit mematuhi peraturan, keputusan legislatif, kontrak, dan kode etik yang berlaku.

Hasil pemeriksaan ini dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan bertujuan memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan material akibat pelanggaran hukum serta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum, baik langsung maupun tidak langsung (IHPD BPK, 2023).

Adapun temuan yang dilaporkan BPK yaitu seperti pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas), proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, dan lain-lain yang hal tersebut merupakan bagian dari penyusunan laporan keuangan yang masih belum sesuai dan tepat (IHPD BPK, 2023).

Permasalahan tersebut terjadi karena kepala perangkat daerah kurang optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan di satuan kerjanya, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pelaksana kegiatan kurang cermat dalam menjalankan tugas. Untuk mengatasi hal ini, BPK merekomendasikan agar pimpinan entitas memerintahkan kepala perangkat daerah meningkatkan pencatatan, penyusunan laporan, dan pengendalian atas pengelolaan keuangan. Selain itu, pejabat yang bertanggung jawab diminta lebih teliti dalam melaksanakan tugas, meningkatkan pengawasan dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, serta memproses dan menyetorkan kelebihan pembayaran ke kas daerah sesuai ketentuan (IHPD BPK, 2023).

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemko Medan Tahun Anggaran 2023, ditemukan kekurangan penerimaan pajak daerah sebesar Rp5,01 miliar dari sektor hotel, restoran, dan hiburan. Bapenda Kota Medan telah menindaklanjuti sebesar Rp1,29 miliar, dan sisanya Rp3,71 miliar telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar kepada wajib pajak. Kekurangan ini disebabkan adanya bukti baru dari BPK RI yang menunjukkan

perbedaan perhitungan pajak oleh wajib pajak, mengingat sistem pemungutan berdasarkan self-assessment sesuai UU No. 1 Tahun 2024 dan Perda No. 1 Tahun 2024 (Metro-Online, 2024).

Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat faktor-faktor yang dinilai dapat memengaruhi kualitas dari laporan keuangan. Antara lain yaitu kompetensi sumber daya manusia dan juga komitmen organisasi. Dari hasil penelitian sebelumnya menunjukkan tingkat signifikansi yang berbeda-beda sehingga hasil dan dampak yang ditimbulkan berbeda pula dengan wilayah yang dijadikan tempat pengambilan data sebagai pengacunya.

Penelitian terkait kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan yang dilakukan oleh Ridzal et al (2022) menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Pada penelitiannya terlihat terdapat sumber daya manusia yang handal dalam penyusunan laporan keuangan dapat menghemat waktu dalam penyusunan laporan keuangan, karena sumber daya manusia tersebut sudah tahu dan paham apa yang dilakukan dengan baik sehingga laporan keuangan dapat disampaikan dengan tepat waktu. Dengan sumber daya manusia yang kompeten, dapat dikatakan bahwa perannya dalam strategi dapat diimplementasikan dengan efisien (Azhar et al., 2023).

Hasil berbeda ditunjukkan oleh Sari & Widiatmoko (2023) yang hasil penelitiannya kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya sumber daya manusia yang kompeten tidak menjamin

bahwa laporan keuangan yang dihasilkan akan berkualitas. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku belum cukup memadai dalam mendorong pencapaian tujuan organisasi dalam menghasilkan output berupa laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian terkait komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan yang dilakukan oleh S. Mula et al (2024) menunjukkan hasil variabel komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada Pemerintah Desa Se-Kecamatan Boliyohuto. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik komitmen organisasi maka semakin baik pula kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan.

Hasil berbeda ditunjukkan oleh Sri Ayem (2023) yang pada penelitiannya menunjukkan hasil komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya, sebuah organisasi memiliki prosedur dan peraturan terkait kinerja pegawai, tetapi ini tidak selalu diterapkan dengan benar oleh pemangku kepentingan dalam organisasi.

Perbedaan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu terletak pada susunan variabel yang digunakan, lokasi dilakukannya penelitian, dan juga responden yang berbeda-beda sehingga menyebabkan perbedaan persepsi dan pandangan terhadap variabel dan juga objek yang diteliti.

Dengan hasil yang berbeda-beda dari penulis pada penelitian sebelumnya dan saran dari Peneliti sebelumnya untuk meneliti variabel lain, serta memperbesar jumlah sampel dan menggunakan wawancara mendalam guna meningkatkan kualitas data dan mengurangi bias responden. menjadikan penulis tertatik untuk

melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intrvening pada OPD Kota Medan**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka adapun identifikasi masalah yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu:

1. Rendahnya kompetensi sumber daya manusia di OPD Kota Medan seperti pemahaman teknis akuntansi pemerintah, penguasaan teknologi informasi, dan kemampuan analitis, yang dinilai dapat berdampak pada kesalahan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang masuk ke dalam daftar temuan hasil pemeriksaan BPK.
2. Komitmen organisasi di lingkungan OPD dinilai masih lemah, seperti minimnya dukungan pimpinan, kurangnya kepedulian terhadap akuntabilitas, dan rendahnya motivasi pegawai untuk mematuhi peraturan pengelolaan keuangan, berpotensi menurunkan kualitas laporan keuangan.
3. Masih banyaknya pegawai negeri sipil di lingkungan OPD yang ditemukan kurang andal dan masih melakukan kesalahan pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Adapun masalah-masalah yang ditimbulkan dinilai mengurangi efektivitas sistem.

1.3 Pembatasan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini hanya berkaitan dengan pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan

Keuangan dengan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intrvening pada OPD Kota Medan.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang tercakup dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan
2. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan?
3. Apakah Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mampu memediasi pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan?
4. Apakah Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mampu memediasi pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan?

1.4.1 Teori *Stewardship*

Stewardship adalah konsep yang menekankan motivasi kerja manajemen yang berorientasi pada pencapaian tujuan pihak principal. Manajemen tidak selalu bekerja berdasarkan kepentingan pribadi tetapi berupaya untuk memaksimalkan manfaat bagi principal. *Stewardship* juga tidak selalu terkait dengan konflik yang signifikan antara agen (manajemen) dan principal dalam suatu organisasi. Sebaliknya, agen bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan principal

dengan saling mendukung dalam manajemen organisasi atau perusahaan (Naiaki et al., 2024).

Teori *Stewardship* merupakan bagian dari *Agency Theory* yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Menurut Donaldson dan Davis (1991), teori ini menggambarkan kondisi di mana manajemen tidak hanya terdorong oleh kepentingan pribadi, tetapi lebih berfokus pada pencapaian tujuan utama organisasi. Teori ini berasumsi bahwa terdapat hubungan yang erat antara tingkat kepuasan dan keberhasilan organisasi (Mentari & Kurniawati, 2024).

Chinn dan Shalw dalam Naiaki et al (2024) menjelaskan bahwa teori *Stewardship* berhubungan erat dengan sifat manusia yang secara alami dapat dipercaya, bekerja dengan tanggung jawab, serta memiliki ketulusan dan kejujuran dalam berinteraksi dengan kelompok lain.

Teori *Stewardship* menekankan bahwa manajemen bertindak sebagai pihak yang dipercaya untuk bekerja demi kepentingan bersama dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Berbeda dengan konsep *Agency Theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson, yang melihat manajemen sebagai "agen" bagi para pemegang saham yang bekerja terutama untuk kepentingan pribadi mereka sendiri, teori *Stewardship* justru berasumsi bahwa manajemen lebih berorientasi pada kepentingan organisasi secara keseluruhan daripada keuntungan individu semata (Naiaki et al., 2024).

Penelitian ini menggunakan teori *Stewardship* sebagai *grand theory* karena teori ini dapat menjelaskan bagaimana pemerintah bertindak sebagai steward atau

pengelola yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah demi kepentingan publik. Dalam konteks penelitian ini, kompetensi sumber daya manusia dan komitmen organisasi berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, yang pada akhirnya berkontribusi pada keberhasilan penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di OPD Kota Medan.

Teori *Stewardship* menekankan bahwa pejabat pemerintah dan manajemen organisasi sektor publik memiliki motivasi untuk bertindak demi kepentingan masyarakat, bukan sekadar untuk kepentingan pribadi. Pemerintah, sebagai entitas yang dipercayakan untuk mengelola keuangan daerah, memiliki tanggung jawab dalam memastikan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana komitmen dan kompetensi sumber daya manusia dapat berkontribusi terhadap kesuksesan penerapan SIPKD, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan serta optimalisasi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapula tujuan penelitian dari penelitian yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
2. Menganalisis pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

3. Menganalisis pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang di mediasi oleh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Menganalisis pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang di mediasi oleh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan dalam Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya di Kota Medan.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi tambahan mengenai Kualitas Laporan Keuangan untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga terkait penguatan kompetensi sumber daya manusia dan peningkatan komitmen organisasi guna memperbaiki kualitas laporan keuangan. Selain itu, hasil penelitian dapat membantu instansi dalam mengevaluasi efektivitas penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sebagai alat penunjang akuntabilitas keuangan.